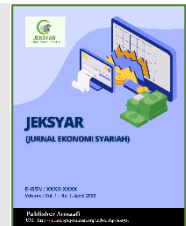




Jurnal Ekonomi Syariah (JEKSYAR)

Annaafi Publisher

Journal Page is available to <http://jurnal.pptq-annaafi.org/index.php/jeksyar>



Monetary Policy and Its Implications for the Financial and Banking Sector in the Islamic Economy

Cindy Yulfa Rossiana¹, Sekar Aprilia Farkhan², Kiky Amalia Rahmawati³

¹ITB AAS INDONESIA

^{2,3}Ekonomi Syariah ITB AAS INDONESIA

email : cindyulfa4@gmail.com¹, sekarfarkhan@gmail.com², amaliarhm16@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 4 Januari 2024

Revised : 6 Januari 2024

Accepted : 10 Januari 2024

Publisher :

An-Naafi' Publisher

JEKSYAR :

Jurnal Ekonomi Syariah

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution
4.0 International License CC
BY license.

ABSTRACT

Abstract

Monetary policy is a strategy that aims to regulate the flow of money in an economy to ensure price stability, control inflation, and maintain full employment and sustainable economic development. Monetary policy in Islamic economics is part of the economic field which discusses the nature, function and impact of a country's economic activities. Islamic currency not only emphasizes the supply and demand for money, but also the principles of egalitarian justice and brotherhood, which strive for equality and create a fair distribution of wealth and income. This paper aims to examine monetary policy from an Islamic economics perspective. The method for writing this article is based on a qualitative research approach. The data analysis method is descriptive analysis. The description it self describes the research results as clearly as possible based on research.

Keywords : Economics, Monetary, Policy, Economis Banking

Abstraksi

Kebijakan moneter yaitu strategi yang bertujuan untuk mengatur aliran uang dalam suatu ekonomi untuk menjamin stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan lapangan kerja penuh dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari bidang perekonomian yang membahas tentang sifat, fungsi dan dampak kegiatan perekonomian suatu negara. Mata uang Islam tidak hanya menekankan pada penawaran dan permintaan uang, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan egaliter dan persaudaraan, yang mengupayakan kesetaraan dan menciptakan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan moneter dari perspektif ekonomi Islam. Metode analisis datanya adalah analisis deskriptif. Uraian sendiri menggambarkan hasil penelitian sejelas-jelasnya berdasarkan penelitian.

Kata Kunci : Ekonomi, Kebijakan Moneter, Pembangunan Ekonomi

JEKSYAR : Jurnal Ekonomi Syariah

1. Pendahuluan

Pemerintah menerapkan peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengelola stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dalam negeri untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat di setiap negara yang baru terpilih.

Menurut Putri & Nasution (2022) Secara khusus, pembentukan bank sentral melalui devaluasi mata uang dan suku bunga serta implementasi rencana ini merupakan salah satu aspek menjalankan kembali program pengembangan otoritas moneter.

Mata uang memiliki peran penting dalam perekonomian, dan diharapkan hal ini akan memungkinkan penekanan pada peningkatan output dan stabilitas harga. Kebijakan moneter merupakan instrument yang sangat penting bagi kebijakan publik baik untuk ekonomi konvensional ataupun ekonomi Islam. Untuk mencapai fungsi yang diinginkan secara baik, maka kebijakan moneter harus melakukan pengawasan kepada seluruh sistem perekonomian terutama pada sistem keuangan (Novitasari., et.al, 2021).

Menurut Putri & Nasution (2022) Tujuan utamanya adalah untuk mencapai stabilitas keuangan, terlepas dari pengaruh faktor internal atau eksternal. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai Rupiah. Stabilitas nilai tukar dapat membantu negara mencapai tujuannya di masa depan, seperti distribusi yang optimal, pemenuhan kebutuhan pokok, kemudahan bekerja, bertumbuhnya ekonomi secara riil, dan stabilitas perekonomian. Praktik ekonomi ini adalah yang terpenting. Namun, ketika sistem ekonomi menjadi lebih buruk, diperlukan perspektif baru tentang produksi uang. Sistem ekonomi tradisional berbeda dari sistem ekonomi Islam tentang hal ini.

Kebijakan keuangan Islam adalah bagian dari ekonomi Syar'iah, dan tujuan mereka adalah untuk meningkatkan keseimbangan dan kemakmuran. *Maqasid Syari'ah* menjamin keadilan dalam segala bidang kehidupan manusia dan menjamin keseimbangan (*Iqama al-Adl*) dengan menerima manfaat (*Jab al-Maslaha*), yaitu manfaat yang bersifat umum, bukan manfaat yang bersifat khusus untuk pemerintah yang terlibat. Dalam keadaan seperti ini, kebijakan moneter memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan sistem makroekonomi. Kebijakan moneter yang sehat memungkinkan perekonomian yang stabil melalui mekanisme yang efektif kemudian menghasilkan informasi seperti harga dan produksi, yang pada gilirannya memberikan pengganda pada berbagai aspek seperti biaya tenaga kerja. Demikian pula, bentuk moneter yang tidak stabil dapat memperburuk masalah inflasi. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah menganalisis kebijakan moneter dari perspektif ekonomi Islam.

2. Landasan Teori

a. Pengertian Kebijakan Moneter

Menurut Mishkin (2009), kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral yang membawa perkembangan variabel moneter terkait jumlah uang yang beredar. Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian, namun faktor-faktor tersebut berada di luar kendali pemerintah. Kebijakan moneter merupakan elemen yang dapat dikendalikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah mata uang yang tersedia untuk bertransaksi sehingga kondisi

makroekonomi disesuaikan untuk memaksimalkan keuntungan. Penjelasan tersebut merupakan tujuan dari strategi kebijakan moneter untuk memperoleh stabilitas harga dan inflasi dan menambah keselarasan produksi. Sebagian besar golongan perekonomian kapitalisme terkait dengan sistem suku bunga, sehingga golongan keuangan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan perekonomian riil. Hal ini disebabkan sektor keuangan menghasilkan pennghasilan lebih cepat dibandingkan sektor riil (Putri & Nasution, 2022).

Banyaknya uang yang beredar di masyarakat disesuaikan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mendukung pencapaian tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat, stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran (Nangarumba, 2016). Stabilitas sistem perbankan dan stabilitas perekonomian moneter merupakan dua aspek yang saling terkait dan saling bergantung.

Stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan tercermin dari kesehatan sektor perbankan dan kemampuan fungsi intermediasi bank dalam memobilisasi simpanan nasional dan menyalurkannya ke dunia komersial dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan lainnya. Jika keadaan ini terus berlanjut maka proses peredaran uang dan mekanisme transmisi kebijakan moneter pada perekonomian yang sedang tumbuh melalui sistem perbankan juga dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, stabilitas sistem perbankan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter (Warjiyo, 2006).

b. Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Tujuan tersebut sama seperti tujuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan juga sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan Pasal 7 UU No. 6 Tahun 2009. Ada dua aspek yang harus dipastikan stabil dari rupiah. Standar pertama stabilitas rupiah yaitu kekuatannya terhadap fluktuasi inflasi harga komoditas dan nilai tukar. Oleh karena itu, ciri kedua adalah terkait fluktuasi nilai rupiah terhadap mata uang lainnya. Untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya, Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Stabilitas nilai tukar sangat penting untuk mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan sasaran Inflation Targeting Framework (ITF) sejak tanggal 1 Juli 2005. Ruang lingkup proyek saat ini sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan dalam UU. Inflasi (tujuan umum) merupakan pesan utama yang perlu diterapkan. Bank Indonesia terus melakukan beberapa penyempurnaan kebijakan moneter untuk merespons dinamika dan perubahan perekonomian guna meningkatkan efektivitasnya.

Perbandingan dengan inflasi yang dipasok pemerintah. Secara fungsional, kebijakan moneter ini bertujuan untuk menggunakan berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka di pasar valuta asing terhadap rupiah dan mata uang lainnya, menetapkan batas pembayaran, memberlakukan persyaratan cadangan, membatasi kredit

dan pinjaman, dll. Selain itu, BI melakukan transaksi keuangan sehari-hari sesuai dengan hukum syariah.

c. Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral dan mempengaruhi jumlah uang dan kredit yang beredar, yang pada akhirnya mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat. Penyesuaian jumlah uang yang beredar di masyarakat dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Menurut Abdianti (2023) Kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan yang meningkatkan jumlah uang beredar yang bertujuan untuk menjamin kelancaran siklus perekonomian. Kebijakan moneter dapat juga mendorong perkembangan ekonomi, dengan risiko inflasi yang lebih tinggi. Kebijakan ini dapat meningkatkan daya beli dan permintaan di masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran di tanah air.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan yang mengurangi jumlah peredaran uang. Kebijakan kontraktif moneter ini diterapkan untuk menurunkan tingkat inflasi negara. Kebijakan kontraktif moneter ini bertujuan untuk mengurangi jumlah mata uang yang beredar dalam perekonomian.

d. Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter adalah alat kebijakan moneter yang dapat digunakan bank sentral untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan. Instrumen kebijakan moneter yang biasa digunakan pemerintah Indonesia dalam kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

1. Operasi pasar terbuka

Operasi pasar terbuka merupakan salah satu strategi perbankan untuk meminimalkan atau menambah jumlah peredaran uang.

2. Penetapan tingkat diskonto

Diskonto berarti pemerintah menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan mengubah tingkat diskonto bank umum. Kebijakan tersebut mencakup langkah-langkah untuk mengubah tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh bank komersial ketika meminjam uang dari bank sentral.

3. Kebijakan cadangan kas

Bank sentral dapat mengeluarkan perintah untuk menambah atau mengurangi cadangan kas (cash ratio). Perubahan kebijakan rasio cadangan dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ketika rasio cadangan wajib diturunkan maka jumlah tabungan cenderung meningkat dan jumlah uang beredar meningkat, begitu pula sebaliknya.

4. Himbauan Moral

Himbau moral yaitu kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang yang beredar dengan memberikan himbauan/nasihat kepada pelaku ekonomi, seperti memberitahu

bank pemberi kredit agar berhati-hati dalam memberikan pinjaman untuk mengurangi jumlah uang beredar dan pada saat yang sama mendorong bank untuk meminjam lebih banyak uang dari bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.

3. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Dengan teknik dan menyajikan hasilnya dalam bentuk naratif, serta menegaskan dalam pencarian suatu makna, konsep serta pengertian ataupun mendeskripsikan tentang kejadian. Dalam pendekatan kualitatif ini terdapat kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, literature yang relevan, dan jenis data berupa dokumen dalam sumber publikasi kemudian penulis mengkaji dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang terkumpul untuk mendiskripsikan masalah kebijakan moneter dalam ekonomi islam. Teknik pengumpulan data dilakukan mengikuti sumber publikasi tersebut. Deskriptif sendiri berarti hasil dideskriptifkan se jelas mungkin berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik kesimpulan apapun dari penelitian tersebut.

4. Hasil Pembahasan

a. Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada keseimbangan jumlah uang beredar dan permintaan, namun juga mengupayakan kesetaraan berdasarkan prinsip keadilan. Dalam ekonomi Islam, Islam mengambil sikap yang sangat kuat dalam reformasi kemanusiaan, pembangunan ekonomi yang seimbang atau regulasi sistem perbankan, yang menciptakan perekonomian yang sehat dan menstabilkan nilai-nilai internal. Namun, untuk mempertahankan sikap rasional dan universal terhadap isu-isu ini, umat islam juga mmeberlakukan pembatasan konsumsi secara kualitatif, yang mana sesuai dengan fitah nya umat islam (Syukriyyah, 2007).

Pada sistem moneter yang ada, bunga merupakan sarana yang digunakan sebagai sarana kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat. Dan Islam tidak memperkenalkan alat suku bunga ke pasar. Tujuan utama kebijakan moneter syariah di sini lebih terfokus pada menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar. Jadi kebijakan moneter dalam islam ini dapat diartikan sebagai pengelolaan mata uang berdasarkan nilai-nilai islam harus menciptakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan yang memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Negara.

b. Tujuan Kebijakan Moneter Dalam Islam

Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu, mekanisme pasar yang efektif untuk menjamin terpeliharanya stabilitas keuangan, terciptanya produk keuangan yang beragam, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan perkembangan ekonomi negara yang diharapkan tercapai. Stabilitas nilai uang ini tidak dapat terlepas dari tujuan kejujuran dan

keterbukaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Tujuan lain dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah :

1. Kemakmuran ekonomi dengan kesempatan kerja penuh Kemakmuran ekonomi diartikan sebagai terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia, baik materiil maupun moral, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesulitan dalam hidup.
2. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan: Konsep ini mencakup dua unsur pemahaman: keseimbangan antara masyarakat yang mempunyai hak dan bentuk perbandingan. Dan hak asasi manusia harus diberikan dan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan.
3. Stabilitas nilai uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa, sehingga kestabilan nilai suatu mata uang mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan perekonomian. Stabilitas nilai mata uang adalah hal terpenting dalam pengelolaan mata uang syariah..

c. Prinsip Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, riba termasuk bunga bank yang dilarang keras dalam Al-Qur'an. Tidak ada unsur riba atau bunga bank dalam kebijakan moneter perekonomian Islam. Dan pengelolaan uang dalam perekonomian Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. (Turmudi, 2019). Kebijakan moneter Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi ada pada Allah SWT
2. Manusia adalah pemimpin (khalifah) bumi, namun bukan penguasa sebenarnya
3. Segala sesuatu yang diterima manusia dengan izin Tuhan
4. Jangan mengumpulkan kekayaan
5. Menghilangkan perbedaan individu dari perekonomian
6. Menetapkan kewajiban dan sukarela dikenakan pada setiap orang, termasuk masyarakat miskin

d. Implikasi Pembangunan Ekonomi Dari Kebijakan Moneter

Dampak kebijakan moneter terhadap pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua yaitu:

1. kebijakan moneter jika dilaksanakan tanpa langkah-langkah aktif untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mendapatkan konsekuensi terhadap pembangunan ekonomi.
2. Perkembangan ekonomi yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan penerapan tersebut dengan langkah-langkah aktif untuk mengatasi fluktuasi ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

sistem keuangan dan perbankan berdasarkan bagi hasil dalam pembangunan ekonomi ada dua yaitu :

1. Investasi dapat dimanfaatkan sepanjang sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin

2. Pengalokasian sumber daya ekonomi dalam batas efisiensi sistem ekonomi berbasis suku bunga membatasi hasil dan tidak maksimalkan investasi atau mencapai potensi dan tingkat investasi sepenuhnya.

e. Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Sektor Keuangan Dan Perbankan

Dampak kebijakan moneter yang pertama dirasakan pada sektor perbankan dan kemudian berdampak pada sektor riil. Tujuan dari kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan nilai rupiah yang terdampak pada tingkat inflasi rendah dan stabil. Dalam perbankan terjadi proses peredaran uang, termasuk penyaluran kredit, dan salah satu cara transmisi kebijakan moneter terjadi di sini. Mekanisme kebijakan moneter yang dilakukan melalui sistem perbankan disebut transmisi kebijakan moneter melalui jalur pinjaman/kredit perbankan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya ada penelitian yang membuktikan adanya saluran pembiayaan perbankan dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia, sedangkan di Indonesia penelitian Hadiksuma (2007) menunjukkan bahwa kebijakan moneter di Indonesia dilaksanakan melalui penyaluran kredit. Hal itu belum memberikan dampak yang besar. Dengan kata lain, tidak ada saluran kredit bank di Indonesia.

Melemahnya transmisi kebijakan moneter melalui penyaluran kredit perbankan dapat disebabkan oleh interaksi dua faktor, yaitu :

1. Sangat fokus di sektor perbankan. Karena konsentrasi identik dengan kehadiran perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi pasar, seperti halnya konsentrasi bank yang menyebabkan peningkatan ukuran bank, konsentrasi juga mengurangi efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui saluran pinjaman bank.
2. Peran bank dalam mekanisme transmisi telah berubah, sebagian disebabkan oleh inovasi keuangan. Inovasi keuangan mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem keuangan.

Di sisi lain, inovasi keuangan mempengaruhi dan memperumit kompleksitas administrasi dan komunikasi kebijakan moneter. Perkembangan inovasi keuangan juga akan menimbulkan keraguan lebih lanjut dalam lingkup perekonomian bagi bank sentral. Pada akhirnya, inovasi keuangan memungkinkan perubahan pada tugas bank. Perubahan ini akan menciptakan tugas baru bagi bank dan mungkin mempengaruhi cara mereka mendistribusikan kredit dan merespons kekuatan kebijakan moneter. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga mempunyai dampak signifikan terhadap kecepatan transmisi kebijakan moneter.

Bank melihat bahwa risiko perekonomian sangat tinggi, mereka cenderung bereaksi sangat lambat terhadap penurunan suku bunga BI 7DRR. Selain itu, ketika bank melakukan konsolidasi untuk memperkuat permodalannya, penurunan suku bunga pinjaman dan peningkatan permintaan pinjaman belum tentu diimbangi dengan peningkatan pencairan dana. Dari sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan mengingat prospek perekonomian yang tidak stabil belum tentu sejalan

dengan peningkatan permintaan pinjaman masyarakat. Jadi kesimpulannya, keadaan sektor keuangan, operasional perbankan, dan kondisi dunia nyata berperan penting dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.

5. Kesimpulan

Kebijakan moneter mengacu pada instrumen keuangan yang digunakan bank sentral atau lembaga keuangan lainnya untuk mencapai tujuan ekonomi. Tujuan menghasilkan uang adalah untuk menstabilkan dan menjaga nilai tukar Rupee. Tujuan tersebut sama dengan Bank Indonesia dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2. Kebijakan moneter adalah kebijakan dimana bank sentral mengatur jumlah dan peredaran uang untuk mencapai keseimbangan domestik (pertumbuhan ekonomi yang cepat, stabilitas harga, dan berkeadilan). pembangunan) dan neraca pembayaran eksternal.

Pencapaian suatu ekonomi makro untuk terpeliharanya stabilitasi ekonomi yang dilihat dari kesempatan kerja, stabilitasi harga dan cara suatu pembayaran. Kelemahan dari konsep moneter yang ada adalah suku bunga dan penggunaan instrumen moneter. Perlu diketahui bahwa pengelolaan mata uang syariah yang telah digunakan di banyak negara selama ini memberikan dampak positif dalam beberapa waktu tertentu. Namun, sulit untuk menjadi solusi jangka pendek. Salah satu alat moral kebijakan moneter berupa peningkatan cadangan devisa dapat digunakan untuk memperparah masalah jangka pendek. Kebijakan moneter adalah kebijakan negara yang menentukan aturan dan tindakan dalam keuangan negara.

References

- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 213-226.
- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 213-226.
- Hadikusuma Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung. Mandar Maju.
- Masrufah, L. (2022). Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Perekonomian: Pengertian, Jenis, Intrumen, Contoh Dari Kebijakan Moneter Dan Fiskal. *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 38-55.
- Mishkin, Frederich S. 2009. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat
- Nangarumba, M. (2016). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(2), 114-130.

- Novitasari, Cindy, And Ray Dwiki Syahputra, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam', Al-Buhuts, 13.1 (2021), 1–25
- Perry Warjiyo, Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA), i- vii: 47
- Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perepektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 166-183.
- Sobarna, N. (2019). Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Co Management*, 1(1), 175-182.
- Syukriyyah, Jurnal Asy-, Irwan Maulana, and Ruslan Husein Marasabessy, 'Kebijakan Moneter Tanpa Bunga', 19.2007 (2018), 95–109
- Turmudi, Imam, 'Kajian Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Islam', An Nawa Jurnal Studi Islam, vol 1.no 2 (2019), 74–90
- Warjiyo, Perry (2006), Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan dan Perkembangannya di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter